

## LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERENCANAAN (PPN)/BAPPENAS. INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN HOLDING INVESTASI

Rapat Ke

: 5

Tahun Sidang

: 2025-2026

Masa Persidangan : I

Jenis Rapat/ke-

: Rapat Kerja / ke-2

Dengan

: 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 3. Gubernur Bank Indonesia; dan

4. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari, Tanggal

: Jum'at, 22 Agustus 2025

Waktu

: Pukul 09.30 WIB s.d. Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I

Ketua Rapat

Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.

(Ketua Komisi XI DPR RI)

Sekretaris Rapat

: Danis Maya

(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)

Acara

: Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun Anggaran

2026

Hadir

: 1. ... orang dari 48 Anggota Komisi XI DPR RI;

2. SRI MULYANI INDRAWATI (Menteri Keuangan) beserta jajarannya;

3. RACHMAT PAMBUDY (Menteri PPN/Kepala Bappenas)

beserta jajarannya: 4. PERRY WARJIYO (Gubernur Bank Indonesia) beserta

jajarannya; dan

5. MAHENDRA SIREGAR (Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan) beserta jajarannya.

## **PENDAHULUAN** 1.

1. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 279 dan Pasal 281 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.24 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dilakukan pendalaman/tanya jawab oleh Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Inddonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026.
- 2. Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melanjutkan pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam RAPBN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang dibagi menjadi (tiga) yaitu :
  - a. Panitia Kerja (Panja) Panja Pertumbuhan;
  - b. Panitia Kerja (Panja) Penerimaan; dan
  - c. Panitia Kerja (Panja) Defisit.

## III. PENUTUP

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuanga ditutup pada pukul **11.39 WIB**.

Jakarta, 22 Agustus 2025

PIMPINAN KOMISI XI DPR RI

KETUA RAPAT,

MENTERI KEUANGAN,

Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H

SRI MULYANI INDRAWATI

MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS,

Rachman

**RACHMAT PAMBUDY** 

**GUBERNUR BANK INDONESIA,** 

ERRY WARJIYO

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MAHENDRA SIREGAR